

ANALISIS PERAN DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP KINERJA EKONOMI
DI KABUPATEN / KOTA JAWA TIMUR

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Untuk Menyusun Skripsi S-1
Jurusan Ilmu Ekonomi



Oleh :

SENDIE ENRIL FAHRIAN
0611010053 / FE / EP

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
JAWA TIMUR
2013

SKRIPSI
ANALISIS PERAN DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP KINERJA EKONOMI
DI KABUPATEN ATAU KOTA JAWA TIMUR

Disusun oleh

Sendie Enril Fahrian
0611010053/ FE/ IE

Telah dipertahankan dihadapan
Dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Pada Tanggal 28 Februari 2013

Pembimbing
Pembimbing Utama

Tim Penguji
Ketua

Dra. Ec Niniek Imaningsih, MP

Dra. Ec. Niniek Imaningsih, MP

Sekretaris

Ir. Hamidah H R, MS

Anggota

Suwarno, Se, Me

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Dr. H Dhani Ichsanuddin, Se, MM
NIP. 19630924.196903.1001

USULAN PENELITIAN

ANALISIS PERAN DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP KINERJA EKONOMI
DI KABUPATEN ATAU KOTA JAWA TIMUR

Yang diajukan

Sendie Enril Fahrian
NPM : 0611010053

Telah disetujui untuk diseminarkan oleh

Pembimbing Utama

Dra. Ec. Niniek Imaningsih, MP

Tanggal: 26 Juli 2012

Mengetahui
Ketua Progdil Ekonomi Pembangunan

Dra. Ec. Niniek Imaningsih, MP
NIP. 196111201987032001

USULAN PENELITIAN

ANALISIS PERAN DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP KINERJA EKONOMI DI KABUPATEN ATAU KOTA JAWA TIMUR

Yang diajukan

Sendie Enril Fahrian
0611010053/ FE/ IE

Telah diseminarkan dan disetujui untuk menyusun skripsi oleh :

Pembimbing Utama

Dra. Ec. Niniek Imaningsih, MP

Tanggal : 26 Juli 2012

Mengetahui
Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi

Dra. Ec. Niniek Imaningsih, MP
NIP. 196111201987032001

SKRIPSI

ANALISIS PERAN DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP KINERJA EKONOMI
DI KABUPATEN ATAU KOTA JAWA TIMUR

Yang diajukan

Sendie Enril Fahrian
0611010053/ FE/ IE

Disetujui untuk Ujian Skripsi oleh :

Pembimbing Utama

Dra. Ec. Niniek Imaningsih, MP

Tanggal : 5 Februari 2013

Mengetahui
A/N Dekan Fakultas Ekonomi
Wakil Dekan I

Drs. Ec. Rahman Amrullah Suwaidi, MS
NIP : 196003301986031003

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat serta hidayah-Nya yang telah dilimpahkan sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu kewajiban mahasiswa untuk memenuhi tugas dan syarat akhir akademis di Perguruan Tinggi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Fakultas Ekonomi khususnya Jurusan Ilmu Ekonomi. Dalam penelitian skripsi ini peneliti mengambil judul “Analisis Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi di Kabupaten atau Kota Jawa Timur”. Terima kasih kepada Ibu Dra. Ec Niniek Imaningsih, MP selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dan selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu dalam membimbing dan mendampingi peneliti selama menempuh pendidikan di dalam perkuliahan. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa di dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangannya. Hal ini disebabkan karena masih terbatasnya kemampuan dan pengetahuan yang ada.

Atas terselesaikannya skripsi ini, peneliti menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir Teguh Sudarto, MP, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Dr. H Dhani Ichsanuddin Nur, MM, selaku Dekan fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

3. Bapak Drs. Ec Rahman Amrullah Suwaidi, MS selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Bapak Drs. Ec Wiwin Priana P, MT sebagai Sekretaris Program Ilmu Ekonomi.
5. Segenap staf pengajar dan staf kantor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, yang telah dengan ikhlas memberikan ilmu pengetahuannya dan pelayanan akademik bagi peneliti.
6. Ayahnda Drs. Ec. H Priyo Hanafi, SE dan Ibunda tercinta Hj. Sumi Harti yang telah sabar mendidik dan membesarkan peneliti dengan penuh kasih sayang dan kesabaran baik moral, material, maupun spiritual.
7. Abang saya Sandi Purnama, MP, kakak Suhesti Anneviarini, MP, kakak Hapsari Oktaviana, SE, Msi, kakak Triana Oktabiyanti, SH dan adik, juga saudara dari ayahnda dan ibunda, yang bersedia memberikan dukungan moril dan doa kepada penulis.
8. Buat sahabat dan cinta yang menjadi sesuatu di kehidupan penulis, terima kasih.

Akhir kata yang dapat terucapkan semoga penyusunan skripsi ini dapat berguna bagi pembaca dan pihak-pihak lain yang membutuhkan, semoga Allah SWT memberikan hidayah dan karunia-Nya kepada kita semua.

Wassallamualaikum Wr. Wb

Peneliti

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Hasil Penelitian Terdahulu	11
2.2. Landasan Teori	13
2.2.1. Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal	13
2.2.2. Teori Barzelay	14
2.2.3. Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi	
Menurut Oates	15
2.2.4. Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan	17
2.2.4.1. Teori Kemiskinan dan Kesejahteraan	18
2.2.4.2. Teori Tenaga Kerja Terserap	20
2.2.4.3. Teori Kesejahteraan.....	21

2.3. Hipotesis	23
2.4. Kerangka Pikir	24

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Definisi dan Pengukuran Variabel	25
3.2. Teknik Penentuan Sampel	26
3.3. Teknik Pengumpulan Data	27
3.3.1. Jenis Data	27
3.3.2. Sumber Data	27
3.3.3. Pengumpulan Data	27
3.4. Teknik Analisis dan Uji Hipotesis	28
3.4.1 Uji Normalitas	28
3.4.2 Uji Path	28
3.5 Uji Hipotesa	30

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Obyek Penelitian	32
4.1. Kabupaten Gresik	32
4.2. Kabupaten Malang.....	34
4.3. Kabupaten Mojokerto	35
4.4. Kabupaten Sidoarjo	36
4.5. Kota Probolinggo.....	38
4.6. Kota Pasuruan	39

4.7. Kota Batu	41
4.8. Kota Surabaya	42
4.2 Deskripsi Hasil Penelitian	44
4.2.1 Variabel Desentralisasi Fiskal	44
4.2.2 Variabel Pertumbuhan Ekonomi	46
4.2.3 Variabel Tenaga Kerja Terserap.....	47
4.2.4 Variabel Penduduk Miskin.....	48
4.2.5 Variabel Kesejahteraan Masyarakat	50
4.3 Analisis Dan Uji Hipotesis	51
4.3.1 Uji Normalitas	51
4.3.2 Uji Path Tahap Pertama	55
4.3.3 Uji Path Tahap Kedua.....	57
4.3.4 Uji Path Tahap Ketiga.....	58
4.3.5 Uji Path Tahap Keempat	59
4.3.5.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat	59
4.3.5.2 Pengaruh Tenaga Kerja Terserap Terhadap Kesejahteraan Masyarakat	60
4.3.5.3 Pengaruh Jumlah Penduduk Miskin Terhadap Kesejahteraan Masyarakat	61
4.4 Pembahasan	66
4.4.1 Pengaruh Disentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	67

4.4.2 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tenaga Kerja Terserap... ..	68
4.4.3 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Berpengaruh Terhadap Penduduk Miskin	69
4.4.4 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Berpengaruh Terhadap Kesejahteraan Masyarakat	71
4.4.5 Pengaruh Tenaga Kerja Terserap Terhadap Kesejahteraan Masyarakat.....	72
4.4.6 Pengaruh Jumlah Penduduk Miskin Terhadap Kesejahteraan Masyarakat..... ..	73

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan	75
5.2. Saran	77

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	6
Tabel 4.1 Hasil Penelitian Variabel Desentralisasi Fiskal.....	45
Tabel 4.2 Hasil Penelitian Variabel Pertumbuhan Ekonomi	46
Tabel 4.3 Hasil Penelitian Variabel Tenaga Terserap.....	47
Tabel 4.4 Hasil Penelitian Variabel Penduduk Miskin	49
Tabel 4.5 Hasil Penelitian Variabel Kesejahteraan Masyarakat	50
Tabel 4.6 Hasil Uji Normalitas Tahap Pertama	52
Tabel 4.7 Hasil Uji Normalitas Tahap Kedua.....	53
Tabel 4.8 Hasil Uji Normalitas Tahap Ketiga	54
Tabel 4.9 Hasil Uji Normalitas Tahap Keempat.....	55
Tabel 4.10 Hasil Uji Regresi Path Pertama	56
Tabel 4.11 Hasil Uji Regresi Path Kedua.....	57
Tabel 4.12 Hasil Uji Regresi Path Ketiga.....	58
Tabel 4.13 Hasil Uji Regresi Path Keempat	59
Tabel 4.14 Hasil Uji Regresi Path Kelima.....	60
Tabel 4.15 Hasil Uji Regresi Path Keenam	62
Tabel 4.16 Hasil Uji Regresi.....	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.4.1 Gambar Kerangka Pikir	24
Gambar 4.3.1 Gambar Sebaran Normalitas tahap Pertama	52
Gambar 4.3.2 Gambar Sebaran Normalitas tahap Kedua.....	53
Gambar 4.3.3 Gambar Sebaran Normalitas tahap Ketiga	54
Gambar 4.3.4 Gambar Sebaran Normalitas tahap Keempat.....	55
Gambar 4.3.5 Gambar Path Disentralisasi fiskal Terhadap Pertumbuhan ekonomi	56
Gambar 4.3.6 Gambar Path Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tenaga Kerja..	57
Gambar 4.3.7 Gambar Path Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penduduk Miskin...	58
Gambar 4.3.8 Gambar Path Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat	60
Gambar 4.3.9 Gambar Path Tenaga Kerja Terserap Terhadap Kesejahteraan Masyarakat	61
Gambar 4.3.10 Gambar Path Jumlah Penduduk Miskin Terhadap Kesejahteraan Masyarakat	62

ANALISIS PERAN DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP KINERJA EKONOMI DI KABUPATEN / KOTA JAWA TIMUR

Sendie Enril Fahrian

Abstraksi

Desentralisasi fiskal itu sendiri adalah pendanaan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang mana, berasal dari pendapatan asli daerah dan pajak yang diterima oleh pemerintah daerah kemudian dikurangi dengan pengeluaran rutin pemerintah daerah. Apabila pendapatan nasional naik anggaran belanja juga naik (surplus) dikarenakan penerimaan pajak naik (karena sistem pajak progresif) kenaikan anggaran belanja (surplus) akan membantu menstabilkan perekonomian. Penurunan pendapatan individu akan berakibat penurunan pengeluaran konsumsi sehingga dapat mencegah terjadinya inflasi.

Penelitian ini dibuat dengan maksud untuk menguji pengaruh dari desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi pada suatu Provinsi, tingkat tenaga kerja, kemiskinan dan tingkat kesejahteraan dan mengolah data dengan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) di Provinsi Jawa Timur, dengan daerah penelitian 4 Kabupaten dan 4 Kota. Selain itu data waktu analisis periode dari tahun 2007 sampai 2011 menggunakan path analysis dari software program SPSS 15 AMOS for windows.

Hasil dari perhitungan menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tenaga kerja terserap. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh tidak signifikan dan mempunyai hubungan yang negatif terhadap jumlah penduduk miskin. Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang negatif terhadap kesejahteraan masyarakat. Tenaga kerja terserap berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang negatif terhadap kesejahteraan masyarakat. Jumlah penduduk miskin berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: desentralisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia sudah dilakukan sejak tanggal 1 Januari 2001. Melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintahan daerah memiliki wewenang untuk menggali pendapatan dan melakukan peran alokasi secara mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan.

Disentralisasi fiskal itu sendiri adalah pendanaan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang mana, berasal dari pendapatan asli daerah dan pajak yang diterima oleh pemerintah daerah tersebut, yang dikurangi dengan pengeluaran rutin pemerintah daerah. Dengan adanya hal tersebut dapat di lihat pula dari kebijakan fiskal dimana perubahan pengeluaran pemerintah atau perpajakan dengan tujuan untuk mempengaruhi susunan permintaan, indikator yang biasanya dipakai untuk kebijaksanaan fiskal adalah budget defisit yakni selisih antara pengeluaran pemerintah dengan penerimaan pemerintah terutama pajak, kemudian Built-in Stabilizer adalah salah satu komponen dalam anggaran belanja pemerintah yang secara otomatis terpengaruh oleh perubahan pendapatan sehingga akan mempengaruhi anggaran belanja. Karena pengaruh yang sifatnya otomatis yang menyebabkan pendapatan tidak sebesar yang diharapkan, seandainya tidak ada pengaruh otomatis tersebut misalnya perpajakan (dari sisi

penerimaan) yang sifatnya progresif. Apabila pendapatan nasional naik anggaran belanja juga naik (surplus) dikarenakan penerimaan pajak naik (karena sistem pajak progresif), kenaikan anggaran belanja (surplus) akan membantu menstabilkan perekonomian, karena penerimaan pajak yang tinggi berarti penurunan pendapatan (disposable income) individu. Penurunan pendapatan individu akan berakibat penurunan pengeluaran konsumsi, sehingga dapat mencegah terjadinya inflasi karena kenaikan pendapatan.

Dari segi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang mana diberikan hak khusus yaitu otonomi daerah bagi setiap daerah untuk meningkatkan pendapatan di setiap daerah masing-masing yang memiliki tingkat sumber daya manusia yang lebih maju atau pada sumber daya alam yang melimpah, untuk itu diharapkan dengan adanya otonomi dan desentralisasi fiskal, dapat lebih pemeratakan pembangunan sesuai dengan keinginan daerah untuk mengembangkan wilayah menurut potensi masing-masing. Menurut UU No. 33 Tahun 2004 sumber penerimaan yang digunakan untuk pendanaan pemerintah daerah dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi pajak daerah, retribusi, laba perusahaan daerah, pendapatan lain-lain yang sah.
2. Dana Alokasi Umum (DAU), menurut ketentuan yang berlaku pada UU No. 25 Tahun 1999, maka alokasi DAU ini ditentukan dengan menggunakan konsep kesenjangan fiskal (fiscal gap), yaitu

mempertimbangkan sisi kebutuhan fiskal (fiscal needs) dan sisi kemampuan fiskal (fiscal capacity).

3. Dana Alokasi Khusus (DAK). DAK pada awalnya hanya berupa DAK untuk kegiatan reboisasi, yang dananya terkait dengan penerimaan dari dana reboisasi dari sektor kehutanan. PP No. 104 Tahun 2000 menggariskan bahwa penerimaan negara yang berasal dari dana reboisasi 40% disediakan kepada daerah penghasil sebagai bagian DAK untuk membiayai kegiatan reboisasi dan penghijauan oleh daerah penghasil. Mulai tahun 2003, alokasi DAK mulai dilakukan untuk sektor-sektor yang lebih luas, terutama adalah sektor yang berkaitan dengan infrastruktur (irigasi dan jalan), pendidikan, dan kesehatan.

4. Pinjaman daerah, dana bagi hasil dan lain-lain penerimaan yang sah.

Dampak pelaksanaan desentralisasi fiskal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur terhadap kondisi makro ekonomi dan sosial menunjukkan hasil yang relatif baik meskipun belum optimal. Selain itu juga isu disentralisasi yang dianggap sebagai jalan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang telah menarik perhatian dari banyak ahli, antara lain dikemukakan oleh Tiebout, Oates, Tresch, Breton, Weingast, dan sebagaimana dikutip oleh Litvack et al dalam Sidik (2002) yang mengatakan bahwa pelayanan publik yang paling efisien seharusnya di selenggarakan oleh wilayah yang memiliki kontrol geografis yang paling minimum karena :

1. Pemerintah lokal sangat menghayati kebutuhan masyarakatnya.

2. Keputusan pemerintah lokal sangat responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga mendorong pemerintah lokal untuk melakukan efisiensi dalam penggunaan dana yang berasal dari masyarakat.
3. Persaingan antar daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya akan mendorong pemerintah lokal untuk meningkatkan inovasinya.

Dalam menjamin terselenggaranya otonomi daerah semakin mantap, maka diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yakni dengan upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Terdapat beberapa indikator untuk melihat kinerja pembangunan daerah.

Indikator pertama, di lihat dari hasil output pembangunan daerah yang tercermin dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Data realisasi menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB riil di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur selama lima tahun terakhir, menunjukkan kecenderungan selalu meningkat. Pada tahun 2007 total PDRB Jawa Timur sebesar 27,17 %, di tahun 2008 sebesar 28,84 %, tahun 2009 sebesar 30,55 %, tahun 2010 sebesar 32,08 % dan di tahun 2011 sebesar 34,25 %. Laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2007 sampai 2011.

Indikator kedua, di lihat dari aspek kemiskinan bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Kemiskinan akan berpengaruh terhadap penurunan indikator-indikator yang ada dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) seperti pendidikan, kesehatan dan pendapatan, karena dengan kemiskinan maka seseorang akan mengeluarkan

pendapatannya hanya untuk kebutuhan pangan atau makanan saja dan akan mengabaikan kebutuhan yang lain seperti pendidikan dan kesehatan, sehingga tidak akan merasakan kehidupan yang layak. Pada tahun 2010 Kabupaten Gresik sebesar 19,14 % dan tahun 2011 sebesar 16,42 %, Kabupaten Malang tahun 2010 sebesar 13,57 % dan tahun 2011 sebesar 12,54 %, Kabupaten Mojokerto tahun 2010 sebesar 13,24 % dan tahun 2011 sebesar 12,23 %, Kabupaten Sidoarjo tahun 2010 sebesar 6,91 % dan tahun 2011 sebesar 7,45 %, Kota Probolinggo tahun 2010 sebesar 47,08 % dan tahun 2011 sebesar 19,03 %, Kota Pasuruan tahun 2010 sebesar 15,76 % dan tahun 2011 sebesar 16,8 %, Kota Batu tahun 2010 sebesar 8,84 % dan tahun 2011 sebesar 9,7 % dan Kota Surabaya tahun 2010 sebesar 171,21 % dan tahun 2011 sebesar 195,6 %. Dari tahun 2010 dan tahun 2011 terdapat perbedaan antara Kabupaten dan Kota di Jawa Timur, dengan perbedaan tiap Kabupaten dan Kota tersebut terlihat adanya perbedaan kesenjangan sosial penduduk miskin di setiap Kabupaten dan Kota, dan pada Kota Surabaya sebagai kota besar yang memiliki tingkat penduduk miskin yang paling tinggi.

Sedangkan indikator ketiga, di lihat dari sosial (tenaga kerja) pada jumlah pengangguran perkotaan dan pedesaan di Provinsi Jawa Timur, yang mana pengangguran perkotaan diperkirakan dua kali lipat dari pengangguran dipedesaan.

Indikator ke empat, dilihat dari kesejahteraan masyarakat dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) pada tahun tertentu. Dari hal tersebut diambil variabel-variabel

makro ekonomi dan sosial, selama pelaksanaan desentralisasi fiskal dari setiap daerah yang mempunyai letak geografis yang berbeda dan perbedaan banyaknya kabupaten dan kota di dalam daerah tersebut belum mampu mengatasi permasalahan mendasar yang dihadapi daerah Kabupaten/Kota di suatu Provinsi.

Tabel 1.1 : Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2011 (dalam Persen)

No	Kabupaten	Tahun	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
1	Kabupaten Gresik	2011	73,98
2	Kabupaten Malang	2011	70,09
3	Kabupaten Mojokerto	2011	72,93
4	Kabupaten Sidoarjo	2011	75,88
5	Kota Probolinggo	2011	73,73
6	Kota Pasuruan	2011	73,01
7	Kota Batu	2011	73,88
8	Kota Surabaya	2011	76,82

Sumber : BPS, Jawa Timur dalam Data Makro Tahun 2011 (diolah)

Keterangan : IPM : Indeks Pembangunan Manusia selama 2007-2011

Dari 4 kabupaten dan 4 kota yaitu Kabupaten Gresik, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Sidoarjo, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, kota Batu dan Kota Surabaya di Jawa Timur dapat dilihat adanya perbedaan secara prosentase dari tahun, baik di lihat dari pertumbuhan ekonomi, jumlah tenaga kerja yang terserap, jumlah penduduk miskin, kesejahteraan masyarakat yang berpengaruh terhadap pendapatan pendanaan daerah atau disentralisasi fiskal yang ada pada Indeks pembangunan manusia. Dari indeks pembangunan manusia pada tahun 2011 sebagai patokan perhitungan disentralisasi fiskal pada Kabupaten Gresik sebesar 73,98 %,

Kabupaten Malang sebesar 70,09 %, Kabupaten Mojokerto sebesar 72,93 %, Kabupaten Sidoarjo sebesar 75,88 %, Kota Probolinggo sebesar 73,73 %, Kota Pasuruan sebesar 73,01 %, Kota Batu sebesar 73,88 % dan Kota Surabaya sebesar 76,82 %.

Dengan adanya hal tersebut terdapat cukup besarnya perbedaan dari segi ekonomi dan jumlah penduduk antara tiap Kabupaten dan Kota yang mempengaruhi kinerja dan jalannya roda perekonomian, tingkat kesenjangan sosial dan pertumbuhan penduduk, dengan perbedaan yang disebutkan di atas maka judul yang diambil peneliti adalah “Analisis Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi Di Kabupaten/Kota Jawa Timur“

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah di uraikan maka dapat di ambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah desentralisasi fiskal (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Y_1) di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur ?
2. Apakah pertumbuhan ekonomi (Y_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tenaga kerja terserap (Y_2) di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur ?
3. Apakah pertumbuhan ekonomi (Y_1) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin (Y_3) di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur ?
4. Apakah pertumbuhan ekonomi (Y_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (Y_4) di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur ?
5. Apakah tenaga kerja terserap (Y_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (Y_4) di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur ?
6. Apakah Jumlah penduduk miskin (Y_3) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (Y_4) di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui desentralisasi fiskal (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Y_1) di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi (Y_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tenaga kerja terserap (Y_2) di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.
3. Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi (Y_1) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin (Y_3) di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.
4. Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi (Y_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (Y_4) di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.
5. Untuk mengetahui tenaga kerja terserap (Y_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (Y_4) di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.
6. Untuk mengetahui Jumlah penduduk miskin (Y_3) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (Y_4) di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Dapat memberi informasi dan sebagai sambungan pemikiran terhadap pembuat kebijakan dalam hal ini pemerintah Kabupaten Gresik, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Sidoarjo, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota Batu dan Kota Surabaya, dalam menetapkan kebijakan dalam ketenagakerjaan industri dalam meningkatkan keterampilan tenaga kerja sebagai porsi yang tepat dalam memilih alternatif.
2. Sebagai bahan untuk penelitian selanjutnya bagi penulis atau peneliti yang mengambil topik pendapatan asli daerah yang terkait dengan Desentralisasi Fiskal, Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
3. Sebagai bahan untuk menambah wawasan dan perbendaharaan literatur perpustakaan UPN “Veteran” Jawa Timur Khususnya perpustakaan Fakultas Ekonomi.